

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang dan Kota Malang)

Mulkan Ahmad Fadillah^{1*}, Dwiyani Sudaryanti², Moh. Amin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : 22001082129@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of regional financial accountability, value for money, honesty, transparency, and government supervision on regional financial management at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) in Malang Regency and Malang City. This research employed a purposive sampling method involving 71 respondents from BKAD officials. Data was analyzed using SPSS 25. The results showed that simultaneously, these variables significantly influenced regional financial management. Further analysis revealed that regional financial accountability and value for money had a positive and significant impact on regional financial management. Conversely, honesty and transparency showed a negative and significant impact. The variable of government supervision was not found to have a significant effect. These findings indicate that increased accountability and efficiency in budget utilization can improve the quality of regional financial management

Keywords: Regional financial management, financial accountability, value for money, honesty, transparency, government supervision

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar penting dalam mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Namun, berbagai tantangan seperti terbatasnya sumber daya, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan dinamika politik seringkali menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif.

Pengujian pada penelitian ini bertujuan agar meneliti dan menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten dan Kota Malang. Pemilihan Malang sebagai objek penelitian didasarkan pada pentingnya kota ini sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur. Penelitian terdahulu mengenai topik ini telah menghasilkan temuan yang beragam. Gerryryan (2017) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, sementara Mohammad Noor Afriza (2021) menemukan pengaruh positif antara akuntabilitas keuangan daerah dan realisasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Banjarbaru.

Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan konteks, variabel yang diteliti, dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini memiliki beberapa keunikan. Pertama, penelitian ini secara simultan menganalisis pengaruh lima variabel independen terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kedua, penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota Malang yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ketiga, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden di BKAD.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori pengelolaan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh *value for money* terhadap pengelolaan keuangan daerah?
4. Bagaimana pengaruh kejujuran terhadap pengelolaan keuangan daerah?
5. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah?
6. Bagaimana pengaruh pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *value for money* terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kejujuran terhadap pengelolaan keuangan daerah
5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah
6. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah

Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan dapat menjadi kontribusi intelektual dan saran pendidikan untuk mengembangkan keterampilan di bidang penelitian.
- b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang pentingnya nilai akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi masukan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bagi akademisi dan pembaca
Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu menjadi sebagai salah satu referensi selanjutnya untuk kegiatan penelitian yang sejenis yaitu tentang akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan keuangan daerah. Diharapkan juga menjadi bahan masukan dan sumbangan informasi selanjutnya, dengan melihat variabel yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memunculkan cara berpikir baru tentang pengelolaan indikator keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Agus Putrayasa & Dana Saputra (2018), penganggaran melibatkan penyusunan rencana, pengumpulan data, penyusunan anggaran, koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan berlandaskan hasil evaluasi. Perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kumalasari & Budi Riharjo (2016) mendefinisikan akuntabilitas sebagai prinsip pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas keuangan daerah melibatkan kewajiban pemerintah

daerah untuk memastikan pengelolaan keuangannya dilakukan dengan kejelasan, efisiensi, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Value For Money

Arifani et al. (2018), Value For Money (VFM) ialah prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yang memastikan bahwa pengeluaran memberikan nilai sebanding dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Konsep ini mencakup tiga aspek utama: input, output, dan hasil, serta sering digunakan dalam konteks pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan, dan pengelolaan keuangan secara umum. VFM juga mencakup langkah tambahan terkait distribusi dan cakupan layanan untuk pemerataan.

Kejujuran

Kejujuran dalam akuntansi sektor publik menjadi landasan yang krusial untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Penerapan kejujuran dalam akuntansi sektor publik bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menciptakan budaya organisasional yang menekankan integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik

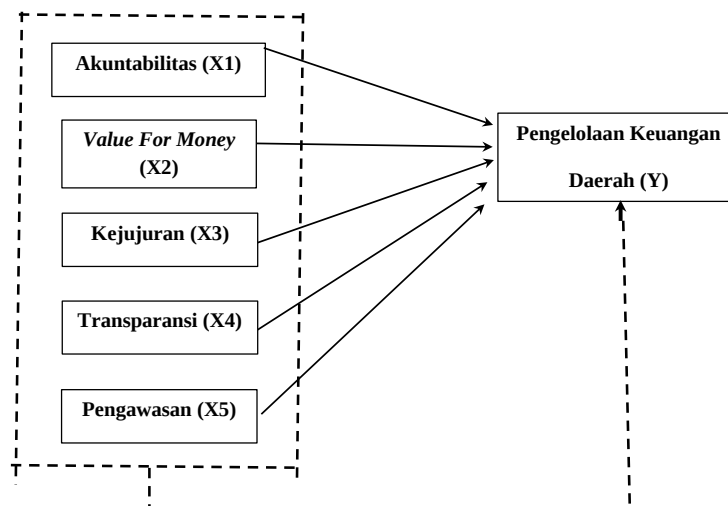
Transparansi

Nurkholis & Khusaini (2019), kejelasan dalam akuntansi sektor publik prinsip ini menekankan aksesibilitas informasi keuangan dan non keuangan untuk menciptakan kejelasan, meningkatkan pertanggungjawaban dan membangun kepercayaan masyarakat. Kejelasan membantu masyarakat memahami penggunaan dana publik, mendukung partisipasi dan akuntabilitas, serta mendorong pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Pengawasan Pemerintah

Pengawasan ialah proses memantau dan mengendalikan aktivitas untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana, kebijakan, atau standar yang ditetapkan. Tujuannya ialah untuk menjamin akuntabilitas, kejelasan dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dengan memantau kinerja dan kepatuhan serta mengurangi risiko. Dalam sektor publik, peninjauan mencakup pemantauan pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber : Data Diolah, 2024

Ket : ———→ Pengaruh Parsial
 - - - - -→ Pengaruh Simultan

Hipotesis

H1 : Akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan

pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah
H2 : Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah
H3 : *Value For Money* berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah
H4 : Kejujuran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah
H5 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah
H6 : Pengawasan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel dalam penelitian (Sugiono 2005: 7). Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam menentukan metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu berupa skor atau nilai pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner atau angket yang telah di jawab oleh responden yang disebarkan. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer berupa kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan yang terstruktur kepada responden pegawai di seluruh kantor BKAD Kota Malang. Responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan fakta yang dialami, seperti yang terlihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Bobot Nilai Kuesioner

No.	Kategori	Bobot Nilai
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Netral (N)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Data diolah, 2024

Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Sinaga, 2014:5). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat/aparatur yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Malang dan Kabupaten Malang berdasarkan website yang tercatat sebanyak 234 pegawai.

Sampel

Sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil (Sinaga, 2014:5). Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penetapan sampel menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai aktif dari Bidang Anggaran, Akuntansi, Aset Daerah dan Perbendaharaan.
2. Pegawai telah lulus pendidikan minimal S1.
3. Berpengalaman bekerja minimal 1 tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data survei ini didasarkan pada data primer yang diperoleh dari survei kuesioner terhadap pejabat pemerintah daerah, pihak berwenang, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Kantor BKAD Kota Malang dan Kabupaten Malang. Terdapat 20 dari 58 Pejabat di Kantor BKAD Kota Malang dan 51 dari 176 Pejabat di kantor BKAD Kabupaten Malang yang memenuhi kriteria atau pertimbangan untuk menjadi sampel

penelitian. Maka total responden yang dijadikan penelitian berjumlah 71 orang.

Tabel 2. Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	
Kuesioner yang disebarkan	71	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	100%
Kuesioner yang kembali	71	100%
Kuesioner yang tidak lengkap	0	100%
Kuesioner yang digunakan penelitian	71	100%
Tingkat pengembalian yang digunakan	100%	100%

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2024

Kuesioner penelitian terdapat 43 pernyataan mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena pernyataan-pernyataan kuesioner penelitian telah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu dan terbukti cukup validitas serta efektivitasnya, maka akan dinyatakan 43 pernyataan memenuhi kriteria untuk dibagikan kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 25 Mei 2024 hingga 9 Juni 2024.

Statistik Responden

Karakteristik responden digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai kriteria responden (Jabatan, pendidikan terakhir dan pengalaman kerja). Rincian demografi responden ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 3. Jabatan Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Staf Anggaran	17	23,9%
Staf Aset Daerah	16	22,5%
Staf Perbendaharaan	17	23,9%
Staf Akuntansi	21	29,6%
Total	71	100%

Sumber : data primer diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa pegawai/pejabat di Kabupaten Malang dan Kota Malang yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dari paling banyak staf akuntansi sejumlah 21 orang (29.6%), staf perbendaharaan sejumlah 17 orang (23,9%), staf perbendaharaan sejumlah 17 orang (23,9%) dan staf aset daerah sebanyak 16 orang (22,5%).

Tabel 4. Pendidikan Terakhir Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
S1	58	81,7%
S2	13	18,3%
Total	71	100%

Sumber : data primer diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa pegawai/pejabat Kabupaten Malang dan Kota Malang yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada kantor BKAD memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 58 orang (81.7%) dan S2 sebanyak 13 orang (18.3%).

Tabel 5. Pengalaman Kerja Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1 > 3 Tahun	23	32,4%
4 > 6 Tahun	28	39,4%
> 6 Tahun	20	28,2%
Total	71	100%

Sumber : data primer diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa data pengalaman kerja dari pegawai/pejabat di Kabupaten

Malang dan Kota Malang yang terkait pengelolaan keuangan daerah telah di kelompokkan dari hasil kuesioner kedalam 3 kelompok yaitu yang paling banyak pegawai/pejabat pengelolaan keuangan daerah yang sudah bekerja 4 – 6 tahun sebanyak 28 orang (39,4%), bekerja 1 – 3 tahun sejumlah 23 orang (32,4%) dan bekerja lebih dari 6 tahun sejumlah 20 orang (28,2%).

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviaton
Akuntabilitas Keuangan Daerah	71	4	5	4,66	0,476
<i>Value For Money</i>	71	4	5	4,66	0,476
Kejujuran	71	4	5	4,69	0,466
Transparansi	71	3	5	4,65	0,537
Pengawasan Pemerintah	71	4	5	4,69	0,466
Pengelolaan Keuangan Daerah	71	2	5	4,63	0,567
Valid N (listwise)	71				

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji di atas dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel akuntabilitas keuangan daerah (X1) nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,66, dan standar deviasi 0,476.
2. Variabel *value for money* (X2) nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,66, dan standar deviasi 0,476.
3. Variabel kejujuran (X3) nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,69, dan standar deviasi 0,466.
4. Variabel transparansi (X4) nilai minimum 3 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,65, dan standar deviasi 0,537.
5. Variabel pengawasan pemerintah (X5) nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,69, dan standar deviasi 0,466.
6. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) nilai minimum 2 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,63, dan standar deviasi 0,567

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

Variabel	No.Item	RHitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1)	X1.1	0.713	0.2335	Valid
	X1.2	0.740	0.2335	Valid
	X1.3	0.707	0.2335	Valid
	X1.4	0.746	0.2335	Valid
	X1.5	0.821	0.2335	Valid
	X1.6	0.740	0.2335	Valid
	X1.7	0.695	0.2335	Valid
	X1.8	0.718	0.2335	Valid
<i>Value For Money</i> (X2)	X2.1	0.769	0.2335	Valid
	X2.2	0.787	0.2335	Valid
	X2.3	0.688	0.2335	Valid
	X2.4	0.796	0.2335	Valid
	X2.5	0.749	0.2335	Valid
Kejujuran (X3)	X3.1	0.593	0.2335	Valid
	X3.2	0.785	0.2335	Valid
	X3.3	0.719	0.2335	Valid
	X3.4	0.747	0.2335	Valid

Variabel	No.Item	RHitung	R Tabel	Keterangan
	X3.5	0.589	0.2335	Valid
	X3.6	0.773	0.2335	Valid
	X3.7	0.854	0.2335	Valid
	X3.8	0.757	0.2335	Valid
Transparansi (X4)	X4.1	0.859	0.2335	Valid
	X4.2	0.853	0.2335	Valid
	X4.3	0.868	0.2335	Valid
	X4.4	0.910	0.2335	Valid
	X4.5	0.833	0.2335	Valid
	X4.6	0.330	0.2335	Valid
	X4.7	0.796	0.2335	Valid
Pengawasan Pemerintah (X5)	X5.1	0,626	0,2335	Valid
	X5.2	0,702	0,2335	Valid
	X5.3	0,780	0,2335	Valid
	X5.4	0,734	0,2335	Valid
	X5.5	0,472	0,2335	Valid
	X5.6	0,827	0,2335	Valid
	X5.7	0,877	0,2335	Valid
	X5.8	0,765	0,2335	Valid
	X5.9	0,835	0,2335	Valid
	X5.10	0,850	0,2335	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,739	0,2335	Valid
	Y2	0,737	0,2335	Valid
	Y3	0,797	0,2335	Valid
	Y4	0,755	0,2335	Valid
	Y5	0,761	0,2335	Valid

Sumber: Data primer diolah 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 7 nilai koefisien korelasi (r- hitung) masing-masing item pernyataan dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika r- hitung > r-tabel dengan taraf signifikansi 0,05 (5%), maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0,877	0,60	Reliabel
Value For Money	0,813	0,60	Reliabel
Kejujuran	0,871	0,60	Reliabel
Transparansi	0,899	0,60	Reliabel
Pengawasan Pemerintah	0,913	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,814	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 8 menjelaskan bahwa item pernyataan pada setiap variabel nilai *Cronbach's Alpha* > *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6 maka item pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.61814799
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.018
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^{c,d}

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan hasil dalam tabel 9 di atas, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (Asymp.sig (2-tailed)) untuk akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengawasan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah memberikan nilai *Sig.* sebesar 0,072 > 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh data akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengawasan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.221	4.525	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Value For Money</i>	0.235	4.252	Tidak terjadi multikolinearitas
Kejujuran	0.122	8.194	Tidak terjadi multikolinearitas
Transparansi	0.233	4.295	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengawasan Pemerintah	0.149	6.710	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF memiliki nilai lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.654	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<i>Value For Money</i>	0.814	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kejujuran	0.385	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Transparansi	0.672	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengawasan Pemerintah	0.769	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data diolah 2024

Berdasarkan tabel 11 diatas menunjukkan bahwa pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan metode uji Glejser yang nilainya dilihat dari sig. Pada variabel akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 12. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.179	.699		-.256
	Akuntabilitas Keuangan Daerah	.602	.037	.940	16.347
	<i>Value For Money</i>	.327	.055	.440	5.917
	Kejujuran	-.148	.050	-.230	-2.967
	Transparansi	-.093	.031	-.168	-3.007
	Pengawasan Pemerintah	.042	.034	.086	1.222

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel regresi tersebut, maka hasil dari analisis regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) sebesar -0.179 artinya bahwa ketika skor variabel akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah dianggap tidak ada atau sama dengan nol, maka pengelolaan keuangan daerah adalah -0.179.
- Koefisien regresi variabel akuntabilitas keuangan daerah (β_1) sebesar 0.602 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ artinya bahwa ketika akuntabilitas keuangan daerah meningkat maka pengelolaan keuangan daerah akan meningkat.
- Koefisien regresi variabel *value for money* (β_2) sebesar 0.327 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ artinya bahwa ketika *value for money* meningkat maka pengelolaan keuangan daerah akan meningkat.
- Koefisien regresi variabel kejujuran (β_3) sebesar -0.148 dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ artinya bahwa ketika kejujuran meningkat maka pengelolaan keuangan daerah akan menurun.
- Koefisien regresi variabel transparansi (β_4) sebesar -0,093 dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ artinya bahwa ketika interaksi kesadaran wajib pajak dengan kemauan membayar pajak meningkat maka pengelolaan keuangan daerah akan menurun.
- Koefisien regresi variabel pengawasan pemerintah (β_5) sebesar 0,042 dengan nilai signifikan $0,226 > 0,05$ artinya bahwa ketika interaksi pengawasan pemerintah meningkat maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan mengalami perubahan.

Uji Hipotesis Uji F (Simultan)

Tabel 13. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268.393	5	53.679	260.737	.001 ^b
	Residual	13.382	65	.206		
	Total	281.775	70			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Pemerintah, Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Transparansi, Kejujuran

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 13 didapat nilai signifikansi (sig.) pada uji F kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Maka hal ini menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh antara akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	.953	.949	.454
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Pemerintah, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Transparansi, Kejujuran				

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* pada penelitian ini sebesar 0,949 (94,9%), maka dapat diinterpretasikan bahwakemampuan variabel akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah menerangkan variasi variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 94,9% dan sisanya diterangkan oleh variabel independen lain yang tidak ada dalam penelitian ini sebesar 5,1%.

Uji t (Parsial)

Tabel 15. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.179	.699		-.256	.799
	Akuntabilitas Keuangan Daerah	.602	.037	.940	16.347	.001
	<i>Value For Money</i>	.327	.055	.330	5.917	.001
	Kejujuran	-.148	.050	-.230	-2.967	.004
	Transparansi	-.093	.031	-.168	-3.007	.004
	Pengawasan Pemerintah	.042	.034	.086	1.222	.226
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah						

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji t yang sudah didapatkan pada tabel 15, maka dapat dihasilkan keterangan sebagai berikut:

- Hasil dari pengujian pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Hasil dari pengujian pengaruh *value for money* terhadap pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa variabel *value for money* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *value for money* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Hasil dari pengujian pengaruh kejujuran terhadap pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa variabel kejujuran menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejujuran berpengaruh terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan daerah.
- Hasil dari pengujian pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa variabel transparansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Hasil dari pengujian pengaruh pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa variabel pengawasan pemerintah menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,226 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kantor BKAD Kabupaten Malang dan Kota Malang, bahwa kualitas pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Semakin tinggi kelima faktor tersebut, maka diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan semakin tinggi pula.
2. Variabel akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kantor BKAD Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka semakin tinggi akuntabilitas keuangan daerah semakin tinggi juga pengelolaan keuangan daerah.
3. Variabel *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kantor BKAD Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka semakin tinggi *value for money* semakin tinggi juga pengelolaan keuangan daerah.
4. Variabel kejujuran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kantor BKAD Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka semakin tinggi kejujuran semakin turun pengelolaan keuangan daerah.
5. Variabel transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kantor BKAD Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka semakin tinggi transparansi semakin turun pengelolaan keuangan daerah.
6. Variabel pengawasan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di kantor BKAD Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka semakin tinggi ataupun turun pengawasan pemerintah maka tidak terjadi peningkatan maupun penurunan pada pengelolaan keuangan daerah dikarenakan tidak dapat diterima.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki peneliti. Adapun keterbatasan yang dimiliki peneliti yaitu ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada dua wilayah dari Malang Raya yaitu Kabupaten Malang dan Kota Malang.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian agar dapat menghasilkan kontribusi yang lebih bermakna dan mempertimbangkan pernyataan dalam kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Putrayasa, I. M., & Dana Saputra, M. (2018). Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan. *Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(1).
- Arifani, C., Agustinus Salle, yahoocoid, & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). In *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* (Vol. 13, Issue 1).
- Kumalasari, D., & Budi Riharjo, I. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11).
- Lidia Gultom, L. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ilmiah Multidisiplin*, 1. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1804>
- Mohammad Noor Afriza. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada

- Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020. *KINDAI*, 17(3), 438–445.
<https://doi.org/10.35972/kindai.v17i3.625>
- Nurkholis, & Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik* (Vol. 1). Universitas Brawijaya Press.
- Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Online Mahasiswa*, 4(1).
- Sinaga, D. (2014). *Buku Ajar Statistika Dasar* (Aliwar, Ed.). UKI PRESS
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. *Alfabeta*, 92.